



## **BAB I** **PENDAHULUAN**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk melaksanakan amanat tersebut, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang menyajikan Laporan Keuangan SKPD Tahun 2023.

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Laporan Keuangan (LK) yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual sesuai dengan Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan ini terdiri dari 5 (lima) laporan, yaitu: (a) Laporan Realisasi APBD; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan.

### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas akuntansi berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas akuntansi, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

### **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaporan keuangan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 ayat (1);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang;
- Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Jombang;
- Perbup 117 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 87 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang;
- Perbup 116 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 86 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang.

### **1.3 Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan sistematika sebagai berikut.

#### Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan;

#### Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian target Kinerja Keuangan
- 2.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

#### Bab III Penjelasan atas Pos - Pos Laporan Keuangan

- 3.1 Rincian Dari Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan
  - 3.1.1 Pendapatan - LRA
  - 3.1.2 Belanja
  - 3.1.3 Pendapatan - LO
  - 3.1.4 Beban
  - 3.1.5 Aset
  - 3.1.6 Kewajiban
  - 3.1.7 Ekuitas Dana
- 3.2 Pengungkapan Atas Pos-pos Aset dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis kas, untuk Ekuitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Yang Menggunakan Basis Akrual

#### Bab IV Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

#### Bab V Penutup



## BAB II

### IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

#### 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan setiap entitas akuntansi wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan kinerja. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Tahun 2019 Nomor 6332) bahwa pencapaian kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang diuraikan dalam Lampiran Laporan Ikhtisar Pencapaian Kinerja.

Secara umum target dalam APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang tercapai sesuai target yang ditetapkan sesuai dengan Renstra Tahun 2018-2023. Hal tersebut dilihat dari target Belanja dalam Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.10.174.464.710 bisa dicapai sebesar Rp8.952.252.919 atau sebesar 87,99%. Realisasi APBD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
BELANJA	10.174.464.710	8.952.252.919	87,99
BELANJA OPERASI	10.097.497.810	8.875.722.919	87,90
BELANJA MODAL	76.966.900	76.530.000	99,43
SURPLUS/DEFISIT	(10.174.464.710)	(8.952.252.919)	87,99

Tabel 1. menggambarkan pencapaian kinerja keuangan secara umum. Realisasi Belanja sebesar Rp8.952.252.919 atau sebesar 87,99% dari anggaran sebesar Rp10.174.464.710.

Tabel 2. Realisasi Pendapatan dan Beban LO

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban	9.113.307.422	8.765.976.093	347.331.329	3,96
Surplus/Defisit - LO	(9.113.307.422)	(8.765.976.093)	(347.331.329)	3,96

Tabel di atas menggambarkan Realisasi Beban Operasional-LO pada TA 2023 adalah sebesar Rp. 9.113.307.422 atau mengalami kenaikan sebesar 3,96% bila dibandingkan dengan periode tahun anggaran sebelumnya.

#### 2.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara umum tidak terdapat kendala dalam upaya Pencapaian kinerja keuangan sesuai dengan target yang telah ditentukan maupun optimalisasi belanja daerah. Realisasi Belanja Tahun 2023 mencapai 87,99%. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan belanja daerah diantaranya:

- 1) Kegiatan berjalan pada Triwulan IV (P.APBD) sehingga intensitas pekerjaan terpusat pada Triwulan akhir untuk menyelesaikan tugas dalam rangka pencapaian target kinerja.
- 2) Kurangnya tenaga teknis dan administrasi.
- 3) Adanya tugas tambahan dari Provinsi yaitu penyaluran honor untuk perangkat desa se Kabupaten Jombang sehingga pengadministrasian dokumen pertanggungjawaban keuangan baru bisa diselesaikan pada akhir bulan Desember.



### BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

#### 3.1 Rincian Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan

##### 3.1.1 PENDAPATAN – LRA

Tabel 4. Pendapatan – LRA 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
PENDAPATAN	0	0	-	0

Realisasi pendapatan - LRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2023 Sebesar Rp. 0,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 tidak terdapat perubahan atas realisasi pendapatan – LRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/ defisit, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan. LRA mengungkapkan ketaatan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya keuangan terhadap APBD. Pos-pos yang tercakup dalam LRA meliputi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran. Hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran dan penyebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab ini.

Tabel 5. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
<b>BELANJA</b>	<b>10.174.464.710</b>	<b>8.952.252.919</b>	<b>87,99</b>	<b>8.627.831.067</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>10.097.497.810</b>	<b>8.875.722.919</b>	<b>87,90</b>	<b>8.460.537.067</b>
Belanja Pegawai	5.171.342.280	4.183.388.092	80,90	4.667.530.895
Belanja Barang dan Jasa	4.926.155.530	4.692.334.827	95,25	3.793.006.172
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>10.097.497.810</b>	<b>8.875.722.919</b>	<b>87,90</b>	<b>8.460.537.067</b>
<b>Belanja Modal</b>	<b>76.966.900</b>	<b>76.530.000</b>	<b>99,43</b>	<b>167.294.000</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.966.900	76.530.000	99,43	120.918.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	46.376.000
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>76.966.900</b>	<b>76.530.000</b>	<b>99,43</b>	<b>167.294.000</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>10.174.464.710</b>	<b>8.952.252.919</b>	<b>87,99</b>	<b>8.627.831.067</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(10.174.464.710)</b>	<b>(8.952.252.919)</b>	<b>87,99</b>	<b>(8.627.831.067)</b>

##### 3.1.2 BELANJA

Tabel 6. Belanja 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
BELANJA	10.174.464.710	8.952.252.919	87,99	8.627.831.067



Realisasi belanja daerah tahun 2023 sebesar Rp8.952.252.919 atau 87,99% dari anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp10.174.464.710. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp324.421.852 atau sebesar 3,76 %.

Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
Belanja Operasi	10.097.497.810	8.875.722.919	87,90	8.460.537.067
Belanja Modal	76.966.900	76.530.000	99,43	167.294.000

Rincian anggaran dan belanja daerah tahun 2023, yaitu:

1. Belanja Operasi

Anggaran belanja operasi tahun 2023 adalah sebesar Rp 10.097.497.810 dan realisasinya sebesar Rp 8.875.722.919 atau sebesar 87,90%. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi belanja operasi tahun 2023:

Tabel 8. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
Belanja Pegawai	5.171.342.280	4.183.388.092	80,90	4.667.530.895
Belanja Barang dan Jasa	4.926.155.530	4.692.334.827	95,25	3.793.006.172

Rincian untuk masing-masing jenis belanja operasi diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai tahun 2023 adalah sebesar Rp 4.183.388.092 atau sebesar 80,90% dari anggaran sebesar Rp 5.171.342.280, yang terdiri dari:

Tabel 9. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.599.058.025	1.978.322.319	76,12	2.217.830.517
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.398.203.255	2.030.984.773	84,69	2.297.894.378
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	174.081.000	174.081.000	100,00	151.806.000

b. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 4.692.334.827 atau 95,25% dari anggaran sebesar Rp 4.926.155.530, yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 10. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
Belanja Barang	561.288.974	527.453.377	93,97	533.399.725
Belanja Jasa	3.655.356.800	3.471.296.413	94,96	2.548.886.298



Belanja Pemeliharaan	55.739.226	55.713.600	99,95	107.024.000
Belanja Perjalanan Dinas	548.270.530	532.371.437	97,10	476.196.149
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	105.500.000	105.500.000	100,00	127.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>4.926.155.530</b>	<b>4.692.334.827</b>	<b>95,25</b>	<b>3.793.006.172</b>

## 2. Belanja Modal

Menurut standar akuntansi pemerintahan, belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Realisasi belanja modal tahun 2023 sebesar Rp 76.530.000 terdiri dari rincian sebagai berikut :

Tabel 11. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.966.900	76.530.000	99,43	120.918.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	46.376.000
<b>Jumlah</b>	<b>76.966.900</b>	<b>76.530.000</b>	<b>99,43</b>	<b>167.294.000</b>

Anggaran belanja modal tahun 2023 adalah sebesar Rp 76.966.900 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp76.530.000 atau sebesar 99,43%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2022, realisasi belanja modal pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp90.764.000 atau sebesar 54,25%.

### 2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2023 adalah sebesar Rp76.530.000 yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 12. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	71.822.100	71.780.000	99,94	24.000.000
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0	0	0,00	2.390.000
Belanja Modal Komputer	5.144.800	4.750.000	92,33	94.528.000

### 2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan pada tahun 2023 adalah 0,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
Belanja Modal Bangunan Gedung	0	0	0,00	46.376.000



### 3.1.3 PENDAPATAN – LO

Tabel 15. Pendapatan – LO 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
PENDAPATAN	0	0	-	0

Realisasi pendapatan – LO Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2023 Sebesar Rp0. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 tidak terdapat perubahan atas realisasi pendapatan – LO Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jombang.

### 3.1.4 BEBAN

Tabel 16. Beban 2023

Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
BEBAN	9.113.307.422	8.765.976.093	347.331.329	3,96

Beban Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2023 sebesar Rp 9.113.307.422. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp 347.331.329 atau 3,96 %. Rincian beban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang sebagai berikut :

Tabel 17. Rincian Beban 2023

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN / PENURUNAN	%
Beban Operasi	8.874.542.334	8.464.232.403	410.309.931	4,85
Beban Penyusutan Dan Amortisasi	238.765.088	301.743.690	(62.978.602)	(20,87)

#### 3.1.4.1 Beban Operasi

Pengakuan beban operasi pada Tahun 2023 sebesar Rp8.874.542.334 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 18. Rincian Beban Operasi

Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Pegawai	4.183.388.092	4.667.530.895	(484.142.803)	(10,37)
Beban Barang dan Jasa	4.691.154.242	3.796.701.508	894.452.734	23,56

Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Nilai beban pegawai pada tahun 2023 sebesar Rp4.183.388.092 mengalami penurunan sebesar Rp484.142.803 atau 10,37% dibandingkan dengan nilai beban pegawai Tahun 2022 sebesar Rp4.667.530.895 Pengakuan beban pegawai tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 19. Rincian Beban Pegawai

Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.978.322.319	2.217.830.517	(239.508.198)	(10,80)
Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.030.984.773	2.297.894.378	(266.909.605)	(11,62)



Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	174.081.000	151.806.000	22.275.000	14,67

Beban Barang dan Jasa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang pada tahun 2023 sebesar Rp4.691.154.242 dan jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp3.796.701.508 maka terdapat kenaikan sebesar Rp894.452.734 atau sebesar 23,56% , dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20. Rincian Beban Barang dan Jasa 2023

Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Barang	527.040.877	534.572.725	(7.531.848)	(1,41)
Beban Jasa	3.470.528.328	2.550.408.634	920.119.694	36,08
Beban Pemeliharaan	55.713.600	108.024.000	(52.310.400)	(48,42)
Beban Perjalanan Dinas	532.371.437	476.196.149	56.175.288	11,80
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	105.500.000	127.500.000	(22.000.000)	(17,25)

### 3.1.4.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Pengakuan beban penyusutan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang pada tahun 2023 sebesar Rp238.765.088, jika dibandingkan dengan beban penyusutan dan amortisasi tahun 2022 yakni sebesar Rp301.743.690 mengalami penurunan sebesar Rp62.978.602 atau 20,87 % dengan rincian beban penyusutan dan amortisasi sebagai berikut:

Tabel 22. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 2023

Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	136.918.575	199.897.177	(62.978.602)	(31,51)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	78.909.487	78.909.487	0	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.410.026	1.410.026	0	0
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	21.527.000	21.527.000	0	0

### 3.1.5 ASET

Tabel 23. Aset 2023

Uraian	2023	2022
ASET	2.760.348.871	2.922.171.459

Pengakuan Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang tahun 2023 sebesar Rp2.760.348.871 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 24. Aset 2023

Uraian	2023	2022
ASET LANCAR	560.500	148.000
ASET TETAP	2.724.434.371	2.865.142.459



### 3.1.5.1 Aset Lancar

Aset lancar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang per 31 Desember 2023 adalah Rp560.500 terdiri dari

Tabel 25. Aset Lancar 2023

Uraian	2023	2022
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.630.921.593	1.630.921.593
Penyisihan Piutang	( 1.630.921.593)	( 1.630.921.593)
Persediaan	560.500	148.000

#### 1. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo piutang lain-lain PAD yang sah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.630.921.593,00 merupakan pokok dan bunga pinjaman dalam kegiatan pemberian pinjaman kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh SKPD. Mutasi piutang lain-lain PAD yang sah dirinci sebagai berikut :

Tabel 26. Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023

Piutang Lainnya	Saldo Awal (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pengurangan Piutang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.630.921.593	0	0	1.630.921.593
<b>Jumlah</b>	<b>1.630.921.593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.630.921.593</b>

#### 2. Penyisihan Piutang

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah umur piutang. Nilai penyisihan piutang untuk piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain PAD yang sah dan piutang lainnya tidak sama besarnya, jadi piutang tidak bisa ditampilkan menjadi satu tabel. Adapun rincian penyisihan piutang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Rincian Kualitas Piutang Per 31 Desember 2023

Piutang Lainnya	Umur Piutang/Penyisihan Piutang					Total
	< 1 thn (0%)	1 s/d 2 thn (10%)	>2 s/d 3 thn (20%)	> 3 s/d 5 thn (50%)	> 5 thn (100%)	
Penyisihan Piutang Pokok	-	-	-	-	1.440.556.267	1.440.556.267
Penyisihan Piutang Bunga	-	-	-	-	190.365.326	190.365.326
Jumlah Piutang	-	-	-	-	1.630.921.593	1.630.921.593
<b>Jumlah Penyisihan Piutang</b>	-	-	-	-	<b>(1.630.921.593)</b>	<b>(1.630.921.593)</b>

#### 3. Persediaan

Semua jenis persediaan dalam tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Saldo persediaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp560.500. Persediaan dicatat dengan metode *perpetual*, yaitu setiap transaksi penerimaan maupun pengeluaran barang persediaan dicatat dalam kartu barang. Mutasi persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian persediaan berdasarkan jenis persediaan per 31 Desember 2023 terdiri dari:

Tabel 28. Rincian Persediaan Menurut Jenis Persediaan

No.	Jenis Persediaan	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	289.000	63.000



No.	Jenis Persediaan	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
2	Persediaan Kertas dan Cover	271.500	35.000
3	Persediaan Perabot Kantor	0	50.000
<b>Jumlah</b>		<b>560.500</b>	<b>148.000</b>

1. Persediaan Alat Tulis Kantor

Saldo persediaan alat tulis kantor per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp289.000, sedangkan saldo persediaan alat tulis kantor per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp63.000, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29. Persediaan Alat Tulis Kantor

No.	ATK	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1	Kertas HVS 70gr	124.000	63.000
2	Odner Forte	130.000	0
3	Stopmap kertas	9.000	0
4	Isi stapler kecil	17.500	0
5	Gunting kecil	8.500	0
<b>Jumlah</b>		<b>289.000</b>	<b>63.000</b>

2. Persediaan Kertas dan Cover

Saldo persediaan kertas dan cover per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp271.500, sedangkan saldo persediaan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp35.000. Rincian persediaan kertas dan cover per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 32. Persediaan kertas dan cover

No.	SKPD	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1	Blanko BBM	9.000	0
2	Stopap DPMD	262.500	35.000
<b>Jumlah</b>		<b>271.500</b>	<b>35.000</b>

3.1.5.2 Aset Tetap

Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.724.434.371 dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	Rp	7.248.984.796
Penambahan Tahun 2023	Rp	364.450.000
Jumlah	Rp	7.613.434.796
Pengurangan Tahun 2023	Rp	186.823.500
Aset Tetap per 31 Desember 2023	Rp	7.426.611.296
Penyusutan s/d Tahun 2023	Rp	4.702.176.925
<b>Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>2.724.434.371</b>

Aset Tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang per 31 Desember 2023 tersebut meliputi peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Jenis dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 33. Rincian Aset Tetap

Jenis Aset	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan	2.161.301.875	364.450.000,00	186.823.500,00	2.338.928.375



Mesin				
Gedung dan Bangunan	5.031.281.871	0,00	0,00	5.031.281.871
Jalan, Irigasi dan Jaringan	56.401.050,00	0,00	0,00	56.401.050
<b>Nilai Aset</b>	<b>7.248.984.796</b>	<b>364.450.000,00</b>	<b>186.823.500,00</b>	<b>7.248.984.796</b>
Akumulasi Penyusutan	(4.383.842.337)			(4.702.176.925)
<b>Nilai Buku</b>	<b>2.865.142.459</b>			<b>2.724.434.371</b>

Saldo dan mutasi dari masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2023 tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Tanah

Dasar penilaian aset tetap tanah yaitu harga perolehan, biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan atau harga appraisal bagi aset tetap yang sebelumnya tidak diketahui nilai perolehannya.

Perhitungan nilai tanah sebesar Rp 0,00 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	<b>0,00</b>
Penambahan Tahun 2023	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00
Pengurangan Tahun 2023	Rp	0,00
<b>Nilai Aset Tetap Tahun 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>

Adapun tanah yang ditempati Bangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan aset Dinas Pendidikan.

#### 2. Peralatan dan Mesin

Dasar penilaian aset tetap peralatan dan mesin adalah Harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Perhitungan nilai peralatan dan mesin tahun 2023 sebesar Rp2.338.928.375 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	2.161.301.875
Penambahan Tahun 2023	Rp	364.450.000
Jumlah	Rp	2.525.751.875
Pengurangan Tahun 2023	Rp	186.823.500
<b>Nilai Aset Tetap Tahun 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>2.338.928.375</b>

Jumlah tersebut merupakan aset tetap-peralatan dan mesin milik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang yang terdiri dari:

Tabel 34. Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin

Jenis	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
Alat Angkutan Darat Bermotor	913.244.500	806.324.500
Alat Kantor	183.712.937	183.712.937
Alat Rumah Tangga	447.946.608	445.645.108
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	135.230.000	70.100.000
Alat Studio	85.793.210	85.793.210
Alat Komunikasi	1.500.000	1.500.000
Unit Alat Laboratorium	4.128.000	4.128.000
Persenjataan Non Senjata Api	15.000.000	15.000.000
Komputer Unit	386.289.620	386.289.620
Peralatan Komputer	166.083.500	162.808.500



Jenis	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
<b>Jumlah</b>	<b>2.338.928.375</b>	<b>2.161.301.875</b>

- Penambahan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp364.450.000 berasal dari pengadaan APBD tahun 2023 sebesar Rp76.530.000 dan mutasi tambah berdasarkan BAST No.032/1951/415.10.3.1/2023 tanggal. 19/10/2023 sebesar Rp287.920.000.
- Sedangkan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama tahun 2023 sebesar Rp186.823.500 berasal dari mutasi kurang berdasarkan berita acara Rekonsiliasi BMD tahun 2023 BAST No.032/475/415.33/2023 tgl. 13/10/2023 sebesar Rp181.000.000 dan penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Sekertaris Daerah Kabupaten Jombang No.188/1498.1/415.44/2023 tanggal 13/12/2023 sebesar Rp5.823.500.

### 3. Gedung dan Bangunan

Dasar penilaian aset tetap gedung dan bangunan yaitu Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai gedung dan bangunan tersebut siap digunakan. Perhitungan nilai gedung dan bangunan sebesar Rp4.984.905.871,07 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	5.031.281.871
Penambahan Tahun 2023	Rp	0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>5.031.281.871</b>
Pengurangan Tahun 2023	Rp	0
<b>Nilai Aset Tetap Tahun 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>5.031.281.871</b>

Jumlah tersebut merupakan rincian aset tetap – gedung dan bangunan milik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang yang terdiri dari:

Tabel 35. Rincian Aset Tetap - Gedung dan Bangunan

Jenis	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.031.281.871,07	5.031.281.871,07
<b>Jumlah</b>	<b>5.031.281.871,07</b>	<b>5.031.281.871,07</b>

### 4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Perhitungan nilai jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp56.401.050,00 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	56.401.050,00
Penambahan Tahun 2023	Rp	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>56.401.050,00</b>
Pengurangan Tahun 2023	Rp	0,00
<b>Nilai Aset Tetap Tahun 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>56.401.050,00</b>

Jumlah tersebut merupakan rincian aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan milik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang yang terdiri dari:

Tabel 36. Rincian Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jenis	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Bangunan Air	24.660.000,00	24.660.000,00
Instalasi Gardu Listrik	14.946.250,00	14.946.250,00
Jaringan Listrik	16.794.800,00	16.794.800,00



Jenis	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>Jumlah</b>	<b>56.401.050,00</b>	<b>56.401.050,00</b>

Sesuai Peraturan Bupati Jombang Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang.

#### 5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyajian nilai penyusutan dilakukan sebagai konsekuensi logis atas penyajian nilai aset tetap yang menggunakan metode harga perolehan. Sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 tahun 2020, seluruh aset tetap pemerintah daerah kecuali, Tanah, KDP dan Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanamandan buku perpustakaan, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat masing-masing aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 37. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
<b>1</b>	<b>3</b>			<b>ASET TETAP</b>	
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		<b>Peralatan dan Mesin</b>	
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>Gedung dan Bangunan</b>	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40

Berdasarkan perhitungan nilai Akumulasi Penyusutan Aset tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp4.702.176.925) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38. Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Jenis Aset	Saldo Awal 2023	Saldo Akhir 2022
Peralatan Dan Mesin	( 2.184.734.375 )	( 1.946.719.300 )
Gedung Dan Bangunan	( 2.506.740.457 )	( 2.427.830.970 )
Jalan, Irigasi dan Jaringan	( 10.702.093 )	( 9.292.067 )
<b>Jumlah</b>	<b>( 4.702.176.925 )</b>	<b>( 4.383.842.337 )</b>



### 3.1.5.3 Aset Lainnya

Dasar penilaian aset tetap lainnya adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Perhitungan nilai aset lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp35.354.000 adalah sebagai berikut:

Saldo perolehan	Rp	107.635.000,00
Penambahan	Rp	0,00
Pengurangan (Akumulasi amortisasi 2023)	Rp	72.281.000,00
<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>35.354.000,00</b>

Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Jombang per 31 Desember 2023 meliputi:

Tabel 39. Rincian Aset Lainnya

Jenis	Saldo perolehan (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31-Des-23 (Rp)
Aset Tak Berwujud	107.635.000	0	72.281.000	35.354.000
<b>Jumlah</b>	<b>107.635.000</b>	<b>0</b>	<b>72.281.000</b>	<b>35.354.000</b>

Adapun penjelasan atas aset lainnya tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2023 sebesar Rp107.635.000,00 yaitu:

Tabel 40. Rincian Aset tak Berwujud 2022

No	Nama ATB	2022	Reklas Tambah	Reklas Kurang	Pindah ke Aset Lainnya	2023
1.	Aplikasi Siskeudes	38.500.000	0	0	0	38.500.000
2.	Aplikasi Sabdopalon	69.135.000	0	0	0	69.135.000
<b>Jumlah</b>		<b>107.635.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.635.000</b>

#### 2. Akumulasi Amortisasi

Adapun nilai akumulasi amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 41. Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

No	Uraian	2022	Koreksi atas akumulasi amortisasi ATB	Beban Penyusutan 2022	Pindah ke Aset Lainnya	2023
1.	Aplikasi Siskeudes	(23.100.000)	0	(7.700.000)	0	(30.800.000)
2.	Aplikasi Sabdopalon	(27.654.000)	0	(13.827.000)	0	(41.481.000)
<b>Jumlah</b>		<b>(50.754.000)</b>	<b>0</b>	<b>(21.527.000)</b>	<b>(0)</b>	<b>(72.281.000)</b>

### 3.1.6 KEWAJIBAN

#### 3.1.6.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pelaporan. Pada Tahun 2022 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang sebesar Rp8.136.473 dengan rincian :



Jenis Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	0	0
Utang Beban	8.136.473	8.904.558
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>8.136.473</b>	<b>8.904.558</b>

Mutasi kewajiban jangka pendek selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 42. Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Jenis	Saldo 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Des 2022 (Rp)
Utang Beban	8.904.558	8.136.473	8.904.558	8.136.473
<b>Jumlah</b>	<b>8.904.558</b>	<b>8.136.473</b>	<b>8.904.558</b>	<b>8.136.473</b>

#### 1. Utang Belanja

Utang belanja adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa daerah. Utang belanja dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja, kewajiban kepada masyarakat dan kewajiban kepada pemberi jasa.

Nilai utang beban sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp8.136.473 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 43. Rincian Utang Belanja Tahun 2023

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Tagihan Telepon	182.211,00	1.089.118,00	182.211,00	1.089.118,00
Tagihan Listrik	7.798.453,00	7.047.355,00	7.798.453,00	7.047.355,00
Tagihan Internet	923.800,00	0,00	923.800,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.904.558,00</b>	<b>8.136.473,00</b>	<b>8.904.558,00</b>	<b>8.136.473,00</b>

Penambahan utang belanja sebesar Rp8.136.473 merupakan beberapa kewajiban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada pihak ketiga yang belum terbayar sampai akhir tahun anggaran 2023. Rekapitulasi penambahan berdasarkan jenis utang belanja barang dan jasa sebesar Rp8.136.473 merupakan utang untuk pembayaran beban jasa kantor, yaitu telepon, listrik, dan internet.

#### 3.1.7 EKUITAS DANA

Saldo ekuitas sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.752.212.398 dan 31 Desember 2022 dan sebesar Rp2.913.266.901 mengalami penurunan sebesar Rp161.054.503 atau sebesar 5,52% dari tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.



Rincian dan perubahan ekuitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

URAIAN	2023
EKUITAS AWAL	2.913.266.901
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(9.113.307.422)
RK PPKD	8.952.252.919
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0
LAIN-LAIN	0
EKUITAS AKHIR	<b>2.752.212.398</b>

Saldo ekuitas akhir Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa per 31 desember 2023 sebesar Rp2.752.212.398 mengalami penurunan Rp161.054.503 dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Perbandingan saldo ekuitas akhir Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2023 dan tahun 2022 di sajikan pada tabel sabagai berikut :

Tabel 44. Laporan Perubahan Ekuitas

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	2.913.266.901	3.057.546.287
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(9.113.307.422)	(8.765.976.093)
RK PPKD	8.952.252.919	8.627.831.067
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0	0
LAIN-LAIN	0	(6.134.360)
EKUITAS AKHIR	2.752.212.398	2.913.266.901

Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Saldo awal ekuitas tahun 2023 sebesar Rp2.913.266.901 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2022 pada neraca *audited* 2022.
- Surplus/defisit – LO sebesar Rp9.113.307.422 merupakan nilai defisit pada Laporan Operasional Tahun 2023 yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2023.
- RK PPKD sebesar Rp8.952.252.919 yang menambah nilai ekuitas.
- Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2023 sebesar Rp2.752.212.398.

### 3.2 Pengungkapan Atas Pos-pos Aset dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis kas, untuk Ekuitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Yang Menggunakan Basis Akrual

#### 3.2.1 Pengungkapan Perbedaan Beban-LO dengan Belanja-LRA

Belanja Pegawai	LO	LRA	Selisih
	<b>4.183.388.092</b>	<b>4.183.388.092</b>	<b>0</b>

Nilai beban pegawai dalam laporan operasional per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 4.183.388.092 sedangkan nilai realisasi belanja pegawai dalam laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 4.183.388.092. Tidak terdapat selisih antara beban pegawai-LO dan belanja pegawai-LRA.

Belanja Barang	LO	LRA	Selisih
----------------	----	-----	---------



<b>Jasa</b>	<b>4.691.154.242</b>	<b>4.692.334.827</b>	<b>1.180.585</b>
-------------	----------------------	----------------------	------------------

Terdapat perbedaan nilai beban barang dan jasa-LO dengan nilai belanja barang dan jasa-LRA, yaitu sebesar Rp1.180.585 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 45. Perbedaan Beban LO dan LRA

No.	Nama Beban/Belanja	LO	LRA	Selisih
1	Beban/Belanja Barang Habis Pakai	527.040.877	527.453.377	412.500
2	Beban/Belanja Jasa Kantor	2.505.605396	2.506.373.481	768.085
Jumlah				1.180.585

1. Selisih antara beban barang pakai habis dengan belanja barang pakai habis adalah sebesar Rp2.173.000 yang terdiri dari:

Saldo awal persediaan	Rp	(148.000)
Pengakuan utang 2023	Rp	0
Pengakuan persediaan 2023	Rp	560.500
Pelunasan utang 2022	Rp	0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>412.500</b>

2. Selisih antara beban jasa dengan belanja jasa adalah sebesar Rp768.085 yang terdiri dari:

Pengakuan utang 2023	Rp	(8.136.473)
Pembayaran utang tahun sebelumnya	Rp	8.904.558
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>768.085</b>

<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>LO</b>	<b>LRA</b>	<b>Selisih</b>
	238.765.088	0	238.765.088

Beban penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud hanya diakui dalam laporan operasional, yaitu sebesar Rp238.765.088.

<b>Belanja Modal</b>	<b>LO</b>	<b>LRA</b>	<b>Selisih</b>
	0	76.530.000	76.530.000

Belanja modal dalam laporan realisasi anggaran adalah sebesar Rp76.530.000 namun dalam laporan operasional belanja modal tidak diakui karena belanja modal bukan merupakan beban operasional.



**BAB IV**  
**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**4.1 Pengukuran Kinerja**

Pengukuran Kinerja Tahun 2023 Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Jombang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 46. Indikator Pencapaian Target Kinerja TA 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	77	80,01	103,90	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Desa	83,95	84,1	100,17	Berhasil
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	2,94	2,94	100	Berhasil
		Prosentase Desa yang meningkat status pembangunannya	100%	100%	100	Berhasil
		Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP)	25,86	25,89	100	Berhasil
		Prosentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang aktif	70%	70%	100	Berhasil
		Prosentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) yang berkontribusi pada PADes	95%	95%	100	Berhasil
Rata-rata					100,59	Berhasil



## BAB V PENUTUP

Penyusunan Laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang tahun 2023 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023, yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun semoga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi serta pertanggungjawaban keuangan Kepala Daerah.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN  
JOMBANG,**



**SHOLAHUDDIN HADI SUCIPTO, S.STP, M.Si**

Pembina Tk.I

NIP. 197912082000031001